

## KONSEP PEMERINTAHAN ARAB SAUDI DAN KEBIJAKAN VISI 2030

Adi Warsito<sup>1</sup>, Serli Wulandari<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>1</sup>email: [20201022006@student.uin-suka.ac.id](mailto:20201022006@student.uin-suka.ac.id)

### ABSTRAK

Negara Arab Saudi merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai budaya. Penerapan sistem pemerintahan yang sifatnya kerajaan atau monarki menjadi kajian yang menarik. Sistem pemerintahan yang monarki absolut menjadikan seorang raja memiliki wewenang sebagai kepala pemerintahan juga kepala negara. Tulisan ini bertujuan memberikan khazanah intelektual dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai Arab Saudi modern. Selain itu, sebagai negara yang menjadikan Islam sebagai agama negara dan aspek sejarah yang kuat menjadi tujuan utama penulisan ini. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah dalam perjalanan sejarah Arab Saudi, sistem pemerintahannya sedikit terbuka, dalam kata lain Arab Saudi sepertinya menuju sistem monarki konstitusional, hal tersebut dilihat dari kebijakan MBS terkait Visi 2030 Arab Saudi.

**Kata Kunci:** Arab Saudi, Sistem Pemerintahan, dan Visi 2030.

### ABSTRACT

*Saudi Arabia is a country that upholds cultural values. The application of a government system that is royal or monarchy is an exciting study. An absolute monarchy system of government makes a king have the authority as head of government and head of state. This paper aims to provide intellectual treasures in science, especially in modern Saudi Arabia. In addition, as a country that makes Islam the state religion and a strong historical aspect is the main goal of this paper. While the result of this research is that in the course of Saudi Arabia's history, the government system has been slightly open, in other words, Saudi Arabia seems to be heading toward a constitutional monarchy system, this is seen in MBS's policy regarding Saudi Arabia's Vision 2030.*

**Key Words:** Saudi Arabia, Governance System, and Vision 2030.

### A. PENDAHULUAN

Negara yang memiliki nama lengkap *Kingdom of Saudi Arabia/ Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Sa'udiyah*, merupakan negara yang menganut sistem kerajaan. Sumber pendapatan negara ini sebagian berasal dari pengelolaan minyak bumi. Banyaknya minyak bumi di Arab Saudi, telah memperkuat kerajaan Saud hingga sekarang. Namun, faktor tersebut tidak membuat kerajaan ini melepaskan Islam sebagai asas konstitusi negara. Kekayaan warisan dan sejarah yang erat hubungannya dengan Islam menjadi salah satu alasannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII: akar Pembaruan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 53–54.

Arab Saudi adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Negara yang secara resmi berdiri pada tanggal 23 September 1932 merupakan hasil perjuangan Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal Al-Saud atau Ibnu Saud. Sebagai raja pertama Arab Saudi, Ibnu Saud telah berhasil membangun sebuah sistem pemerintahan yang sifatnya monarki absolut. Sampai saat ini Arab Saudi telah melewati tujuh masa kepemimpinan, yaitu; *Pertama*, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud (1935-1953). *Kedua*, Saud bin Abdul Aziz Al-Saud (1953-1964). *Ketiga*, Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud (1964-1975). *Keempat*, Khalid bin Abdul Aziz Al-Saud (1975-1982). *Kelima*, Fadh bin Abdul Aziz Al-Saud (1982-2005). *Keenam*, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud (2005-2014). *Ketujuh*, Salman bin Abdul Aziz Al-Saud (2015-2017),<sup>2</sup> dan saat ini Arab Saudi dipimpin oleh Mohammed bin Salman atau orang Barat menyingkat (MBS).

Di masa raja Salman bin Abdul Aziz, harga minyak dunia mengalami penurunan (anjlok) hampir 50 persen pada 2014.<sup>3</sup> Penurunan tersebut berdampak pada sisi sosial, politik, dan ekonomi di negara Arab Saudi. Oleh karena itu, Kerajaan Arab Saudi (Mohammed bin Salman) mengeluarkan pandangan untuk tidak mengharapkan minyak bumi sebagai sumber pendapatan negara secara absolut. Ekonomi Arab Saudi mengalami penurunan, oleh karenanya diperlukan satu rancangan untuk membebaskan Arab Saudi dari ketergantungan terhadap minyak bumi. Kesadaran telah melahirkan gagasan yang diusung oleh Mohammed bin Salman dengan istilah Visi 2030 Arab Saudi sebagai satu trobosan besar untuk melepaskan ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak buminya.<sup>4</sup>

Reformasi di beberapa sektor dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi khususnya di kepemimpinan (MBS), termasuk di dalamnya politik, kebudayaan, pendidikan, sosial, hukum, dan keagamaan. Hal ini dibuktikan dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi seperti; *Pertama*, memberikan keleluasaan bagi perempuan di ruang publik, seperti dibolehkannya perempuan menjabat dewan kota melalui pemilu.<sup>5</sup> *Kedua*, dicabutnya larangan mengemudi bagi perempuan dan membolehkan perempuan menyetir mobil. *Ketiga*, mengizinkan perempuan masuk stadion dan menonton bola secara langsung. *Keempat*, menonton di bioskop, serta menyaksikan konser musik, dan sebagainya.<sup>6</sup> Dari paparan di atas secara praktis artikel ini akan mengulas beberapa sub bab yakni; Dinamika sejarah Arab Saudi, Sistem pemerintahan Arab Saudi, Kebijakan Visi 2030 Arab Saudi.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berfungsi untuk mengetahui posisi suatu penelitian di tengah banyaknya penelitian yang membahas pembahasan yang serupa. Terdapat banyaknya penelitian yang membahas Arab Saudi akan tetapi dalam artikel ini hanya akan dihadirkan 3 penelitian yang sejenis guna mengetahui posisi artikel ini, penelitian tersebut yakni; *Pertama*, artikel jurnal yang berjudul “Perkembangan Islam di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern)” yang ditulis oleh Abu Haif, dalam jurnal *Rihlah*. Berisi tentang deskripsi pembangunan Islam di Arab Saudi sebagai suatu studi sejarah, sebagaimana yang telah

---

<sup>2</sup> Abu Haif, “Perkembangan Islam di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern),” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 3, no. 01 (October 21, 2015): 15–16.

<sup>3</sup> Frank Gardner, “Seberapa parah krisis di Arab Saudi? - BBC News Indonesia,” last modified May 13, 2020, accessed June 28, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52644985>.

<sup>4</sup> Sita Hidriyah, “Reformasi Ekonomi Arab Saudi,” *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional* VIII, no. 09 (2016).

<sup>5</sup> Muhaimin, “Sebanyak 20 Perempuan Menang Pemilu Bersejarah di Saudi,” last modified December 14, 2015, accessed June 28, 2022, <https://international.sindonews.com/berita/1069206/43/sebanyak-20-perempuan-menang-pemilu-bersejarah-di-saudi>.

<sup>6</sup> Hidriyah, “Reformasi Ekonomi Arab Saudi.”

diketahui Arab Saudi merupakan negara monarki konstitusi yang terletak di Jazirah Arab, Arab Saudi telah merdeka pada 1932 dan telah melakukan pembangunan selama 6 dekade berdirinya kerajaan tersebut, artikel ini juga menerangkan perkembangan Islam wahabi di Arab Saudi, dan nilai-nilai moderat yang muncul di negara tersebut. Artikel ini hanya menjelaskan gambaran umum yang terdapat di Arab Saudi dan belum menyentuh esensi tentang Arab Saudi itu sendiri mengenai keuangan sosial secara global dan visi Arab 2030 sehingga kehadiran artikel ini berusaha untuk menutupi kekurangan artikel yang ditulis Abu Haif.

*Dua* artikel yang berjudul “Pemilihan Umum Dewan Kota Arab Saudi 2005” yang ditulis oleh Fadlan Ahmad, dalam jurnal Nady Al-Adab. Berisi tentang perkembangan demokrasi di Arab Saudi yang bermula pada 1992, dengan terbitnya dekrit no. 1 yang memuat 4 agenda salah satunya pembentukan *Majelis al-Syura* provinsi (Dewan Kota), selain itu artikel ini juga menjelaskan implikasi partisipasi warga Saudi pada pemilu 2005 terhadap perkembangan demokrasi. Artikel ini hanya menyoroti kondisi perpolitikan Saudi secara global belum membahas sistem kerajaan tersebut dan tidak menjelaskan relasi politik Saudi baik secara nasional maupun internasional agenda politik yang mereka lakukan ditahun 2005. Artikel ini berusaha menutupi kekosongan tersebut berdasarkan sumber yang kredibel sehingga memberikan penjelasan yang luas dan kompleks terhadap Arab Saudi.

*Tiga* artikel yang berjudul “Peran Muhammad bin Salman Terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi” yang ditulis oleh Panji Haryadi, dalam jurnal ICMES. Berisi tentang 4 pilar kenegaraan Arab Saudi yakni; keluarga Saud, paham wahabisme, minyak, dan relasi dengan Amerika Serikat. Secara garis besar pembahasan artikel ini hanya membahas pilar-pilar Arab Saudi dan belum menjelaskan bagaimana peran Muhammad bin Salam (MBS) dalam pilar kenegaraan tersebut. Artikel ini juga belum membahas visi 2030 Arab Saudi yang digagas oleh MBS sehingga menjadikan kaburnya esensi antara judul dan isinya sehingga butuh pendalaman yang lebih intens. Artikel yang ditulis oleh peneliti hadir guna melengkapi kekosongan tersebut sehingga memunculkan gagasan dan pembacaan yang baru dalam menyikapi orientasi perpolitikan yang terjadi di Arab Saudi.

### C. METODE PENELITIAN

Model penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis dalam menjabarkan hasil temuannya. Penelitian kualitatif memiliki ciri, yakni; berlangsung dalam situasi alamiah, terkait dengan situs alamiahnya, munculnya fokus penelitian, sifatnya deskriptif, data penelitian bersifat deskriptif, dan lain lain.<sup>7</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan politik, pendekatan ini digunakan untuk memetakan analisis kebijakan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi guna menyongsong 2030 sehingga menghasilkan kredibilitas dan objektivitas dalam menganalisisnya, selain itu dalam artikel ini terdapat data yang telah dikumpulkan baik berupa buku, jurnal, dan website yang memuat kebijakan Arab Saudi.

Data tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan politik untuk merekonstruksi kebijakan politik dan gambaran umum Arab Saudi. Adapun tahapan analisis yang digunakan dalam artikel ini yakni; 1. Melakukan seleksi teks yang akan di dalam dalam pembuatan artikel ini, 2. Menyusun spesifikasi item yang berkaitan dengan topik pembahasan sebagai alat pengumpul data yang akan disajikan, 3. Melaksanakan penelitian dengan menulis dan menganalisis sumber yang ada, dan buahnya ialah terciptanya

---

<sup>7</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif, dan Kuantitatif)* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 34.

artikel penelitian ini, 4. Terakhir mengetengahkan kesimpulan sebagai hasil analisa kualitatif dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas artikel ini.<sup>8</sup>

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mengenal Negara Arab Saudi dan Sistem Pemerintahannya

Pada 23 September 1932, Arab Saudi menjadi negara berdaulat setelah Abdul Azis bin Abdurrahman bin Faisal Al-Saud secara resmi memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi dengan dukungan tiga puluh sembilan pengikutnya yang bisa menundukkan jantung kekuasaan al-Rasyid. Sebelumnya telah dilakukan beberapa upaya dari kalangan keluarga Saud untuk membentuk dinasti. Dinasti jilid I mengalami kegagalan dikarenakan pemimpinnya, yakni Abdul Azis bin Muhammad al-Saud yang dibunuh oleh seorang Syiah. Sementara Dinasti Jilid II mengalami kegagalan diakibatkan konflik internal yaitu ada penghianatan dari klan Rasyid.<sup>9</sup>



Peta Arab Saudi: Sumber [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id) Profil Singkat Kerajaan Arab Saudi

Negara Arab Saudi atau juga disebut Saudi Arabia terletak di Asia Barat.<sup>10</sup> Secara geografis, Arab Saudi terletak di belahan bumi lintang utara dan bujur timur, yaitu 15°LU-32°LU dan antara 34°BT- 57°BT. Wilayahnya membentang antara Laut Merah di sebelah Barat (1.260 km) dan Teluk Persia di sebelah timur (560 km). Sementara itu, negara Arab Saudi memiliki luas wilayah 2.240.350 km<sup>2</sup>, yang meliputi sekitar 4/5 Semenanjung Arab. Negara ini berbatasan langsung dengan Yordania di Barat Laut (panjang garis batas 728 km), di Utara dengan Irak (814 km), Kuwait (222 km), di Timur dengan Qatar (60 km), Uni Emirat Arab (457 km), Oman (676 km), Bahrain (dibatasi oleh laut), dan di Selatan dengan Yaman (1845 km).<sup>11</sup> Kondisi tanah di Arab Saudi memiliki tanah gersang yang terdiri padang bebatuan dan berpasir, dataran tinggi dan pegunungan yang tandus, serta tidak ada aliran sungai yang permanen. Di beberapa tempat seperti lembah atau cerukan terdapat genangan seperti danau kecil yang disebut *wadi*.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press., 1995), 249.

<sup>9</sup> Andi Adriansyah, "Peran Politik Muhammad bin Salman dalam Modernisasi Menuju Visi 2030 Arab Saudi" (UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 12–13.

<sup>10</sup> Hariyanto, "DAFTAR NEGARA-NEGARA ASIA YANG MENJADI TUJUAN KERJA BMI," *sbmi*, September 19, 2019, accessed June 28, 2022, <https://sbmi.or.id/daftar-negara-negara-asia-yang-menjadi-tujuan-kerja-bmi/>.

<sup>11</sup> KBRI Riyadh, "Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, last modified January 1, 2020, accessed June 28, 2022, <https://kemlu.go.id/riyadh/id>.

<sup>12</sup> Kusnanto, *Peradaban Arab* (Semarang: ALPRIN, 2010), 7.

Jumlah penduduk Arab Saudi pada tahun 2014 adalah 30.770.375 jiwa. Sementara itu, pada tahun 2019 mencapai 34.218.169 jiwa. Dominasi suku di negara ini adalah suku Arab, yakni mencapai 63% terbagi atas 90% Arab, dan 10% Afro-Asia. Sedangkan suku non-Arab mencapai 37% terbagi atas India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Filipina, Indonesia, dan lain-lain. Islam sebagai agama mayoritas dengan 93,7%, Kristen 3,7%, Hindu 1,1% dan lain-lain 1%. Sementara itu, Riyadh (1600 km<sup>2</sup>) adalah kota terbesar yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan (ibu kota) Arab Saudi.<sup>13</sup> Profil Singkat Kerajaan Arab Saudi Di samping itu, Arab Saudi menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, sementara bahasa Inggris kadang juga digunakan di daerah perkotaan. Bahasa Arab *fushah* yang merupakan bahasa yang umumnya digunakan dalam Al-Qur'an, komunikasi resmi (baku), penulisan syair, dan tulisan-tulisan ilmiah dalam akademik. Sementara bahasa Arab *amiyyah* dipakai dalam percakapan sehari-hari.

Masyarakat Arab Saudi memiliki karakter kabilah (kesukuan) dan kekeluargaan yang kuat, sehingga lebih mengutamakan suku di atas pribadi, kehormatan keluarga dan kabilah yang utama. Sistem kabilah ini berpengaruh terhadap cara orang Arab Saudi memperlakukan tamu. Tamu merupakan orang yang harus dihormati, dan harus dilindungi kalau perlu dengan nyawa, khususnya ketika salah satu anggota sukunya sedang berada diluar wilayah sukunya. Sikap timbal balik penghormatan tamu antar kabilah tersebut yang kemudian menciptakan citra bahwa orang Arab sangat menghormati tamu. Profil masyarakat dan budaya Arab.<sup>14</sup>

Selain itu, Arab Saudi adalah negara yang bentuk negara adalah kerajaan dan sistem pemerintahannya monarki absolut, di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya di duduki oleh seorang raja.<sup>15</sup> Negara ini mengklaim konstitusi kerajaan menggunakan kitab suci Al-Qur'an dan *Sunnah* Nabi Muhammad SAW. Tidak ada partai politik yang berdiri dan diizinkan di negara tersebut. Negara Arab Saudi menerapkan sistem pemerintahannya berdasarkan monarki absolut, tetapi sistem pembagian kekuasaan negara ini terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif,<sup>16</sup> seperti negara yang menganut sistem republik lainnya, walaupun lembaga yang ada masih dikontrol oleh raja dan belum mempunyai fungsi independensi sebagaimana yang berlaku di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan republik, contohnya Indonesia. Pemimpin eksekutif di Arab Saudi adalah raja dan perdana menteri dalam hal ini adalah Mohammed ibn Salman sejak 2017. (Ini Sederet Jabatan yang Disandang Mohammad bin Salman di Arab Saudi)<sup>17</sup> Para Dewan Menteri-Menteri diamanahi langsung oleh raja. Kebanyakan dari mereka mayoritas berasal dari kerabat raja. Akan tetapi, sejak oktober 2003 upaya perbaikan terhadap sistem pemilihan ini segera dilakukan. Langkah awalnya adalah dengan mengumumkan niat untuk mengadakan pemilu dari setengah anggota wakil pemerintah lokal dan propinsi dan sepertiga dari anggota dewan al-syura dalam waktu empat sampai lima tahun.<sup>18</sup>

Badan legislatif atau disebut *majlis al-shura* juga ada di Negara Arab Saudi. Raja Fahd telah memperkokoh sendi-sendi *majlis al-shura* ini. Pada sidang Majelis I-V. Pada akhir majlesi V terpilih satu ketua serta seratus lima puluh anggota. Kebanyakan mereka berasal dari para pakar, ulama, dan spesialis dalam bidangnya. *Majlis al-shura* tugasnya menasehati

<sup>13</sup> KBRI Riyadh, "Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi."

<sup>14</sup> KBRI Riyadh, "Profil Masyarakat dan Budaya Arab Saudi," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, last modified January 1, 2020, accessed June 28, 2022, <https://kemlu.go.id/riyadh/id>.

<sup>15</sup> KBRI Riyadh, "Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi."

<sup>16</sup> Nadia Nadir, "SISTEM PEMERITAHAN DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2020): 166–167.

<sup>17</sup> Lutfan Faizi, "Ini Sederet Jabatan yang Disandang Mohammad bin Salman di Arab Saudi," last modified February 5, 2022, accessed June 28, 2022, <https://international.sindonews.com/read/677629/43/ini-sederet-jabatan-yang-disandang-mohammad-bin-salman-di-arab-saudi-1644058921>.

<sup>18</sup> "Pemilihan Umum Dewan Kota Arab Saudi 2005 | Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab," 14, accessed June 28, 2022, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/naa/article/view/10613>.

raja dan juga dewan menteri-menteri terkait program-program serta kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, tugas utama majelis ini adalah mengkoreksi, menafsirkan dan memperbaiki hukum kontrak, hukum, pemerintah, dan perjanjian internasional.<sup>19</sup>

Badan Yudikatif yang dimaksud di atas adalah Dewan Kehakiman Agung. Tugasnya adalah memperhatikan hal-hal yang disebut oleh Raja. Selain itu, merupakan mahkamah banding tertinggi dan menimbang banding dan juga merevisi kasus yang melibatkan hukuman mutilasi atau hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan rendah. Pengadilan Tingkat kedua terdiri dari dua pengadilan yang mendengarkan argumen dan yang tertinggi adalah Pengadilan Banding yang terdiri dari 5 atau lebih hakim. Pengadilan ini tugasnya bisa mendengarkan semua argumen kecuali kasus-kasus dari badan administratif dan pengadilan atau konflik antara pengadilan syariah rendah dengan pengadilan yang lain. Setelah itu, Pengadilan Terbatas yang mendengar kasus-kasus sederhana yang melibatkan hal perdata atau pidana. Sedangkan pengadilan terendah adalah Pengadilan Umum yang mendengar kasus sipil, kriminal, dan pribadi.<sup>20</sup>

Terdiri dari Kabinet yang dibentuk pada tahun 1953 M. Majelis ini sekarang mencakup sejumlah departemen yang berkompeten, seperti: Pertahanan, Luar Negeri, Dalam Negeri, Keuangan, Ekonomi dan Perencanaan, Perminyakan dan Pertambangan, Kehakiman, Urusan Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan, Pendidikan dan Pengajaran, Pendidikan Tinggi, Kebudayaan dan Informasi, Perdagangan dan Perindustrian, Air dan Listrik, Pertanian, Pekerjaan, Urusan komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi, Urusan pedesaan dan kota, layanan sipil, dan haji.<sup>21</sup>

Ada 13 provinsi atau mintiqah pada Arab Saudi. Setiap provinsi dipimpin oleh gubernur atau sering juga disebut dengan istilah Amir. Amir ditunjuk langsung oleh raja. Amir dibantu dengan seorang wakil serta majelis daerah. Terdiri dari ketua-ketua departemen pemerintah tingkat daerah Dewan Daerah. Sementara itu, propinsi di Arab Saudi terdiri 13 provinsi; satu, Propinsi Daerah Riyadh. Dua, Propinsi Daerah Mekkah. Tiga, Propinsi Daerah Madinah. Empat, Propinsi Daerah al-Qoshim. Lima, Propinsi Daerah Timur ibukotanya Damam. Enam, Propinsi Daerah Asir ibukotanya Abha. Tujuh, Propinsi Daerah Tabuk. Delapan, Propinsi Daerah Hail. Sembilan, Propinsi Daerah Perbatasan Utara ibukotanya Ar-ar. Sepuluh, Propinsi Daerah Jizan. Sebelas, Propinsi Daerah Najran. Duabelas, Propinsi Daerah Al-Baahah. Tiga belas, Propinsi Daerah Al-Juf ibukotanya Sakala.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Angga Diharja Firdaus, "Politik Pemerintahan Arab Saudi," May 1, 2010, accessed June 28, 2022, <http://diharjaangga.blogspot.com/2010/05/politik-pemerintahan-arab-saudi.html%20http://ppi.jordan.tripod.com/infoppi2.htm>.

<sup>20</sup> Usman Kari Linge Bin Abdul Wahab, "Demokrasi Dalam Pemikiran Politik : Negara Arab Saudi," *Usman Kari Linge Bin Abdul Wahab*, November 1, 2013, accessed June 28, 2022, <http://usmankari.blogspot.com/2013/11/demokrasi-dalam-pemikiran-politik.html>.

<sup>21</sup> Abu Khansa Salma, "Sisi Lain Arab Saudi: Politik Pemerintahan Arab Saudi," April 20, 2014, accessed June 28, 2022, <http://saudi-tauhid-sunnah.blogspot.com/2014/04/kondisi-orang-riya-di-padang-mahsyar.html>.

<sup>22</sup> "Provinsi di Arab Saudi," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, June 23, 2021, accessed June 28, 2022, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Provinsi\\_di\\_Arab\\_Saudi&oldid=18549697](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Provinsi_di_Arab_Saudi&oldid=18549697).

## Raja-Raja yang Pernah Memimpin Arab Saudi



*Raja-Raja Arab Saudi: Sumber [Sepak Terjang Raja-raja Arab Saudi dari Masa ke Masa](#) | Halaman 2 ([sindonews.com](#))*

Sejak tahun 1932 hingga sekarang, perjalanan sejarah Arab Saudi telah mengalami dinamika. Pergantian kepemimpinan yang terjadi adalah bukti sejarah panjang yang di miliki oleh negara yang memiliki kota suci itu. Oleh karenanya, menguraikan satu demi satu tokoh terkemuka menjadi menari untuk diungkapkan. Adapun raja-raja Arab Saudi dari masa ke masa sebagai berikut: Posisi pertama adalah Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud yang berkuasa sejak 1932 sampai 1953. Raja ini dilahirkan di Riyadh, 1880 lalu kemudian wafat pada, 1953. Beliau berkuasa menjadi seorang raja pada 22 September 1932 hingga 9 November 1953. Syariah Islam adalah landasan utama yang diterapkannya. Sementara itu, Raja Ibn Saud dianggap berhasil mengubah Arab Saudi menjadi negara Islam modern.

Posisi kedua adalah Raja Saud bin Abdul Aziz yang berkuasa sejak 1953 sampai 1964. Beliau lahir pada 1902 lalu wafat pada 1969. Saud dipilih sebagai Putra Mahkota pada 1933 dan memimpin kerajaan pada 1953 hingga 1964. Selama memimpin, Raja Saud meresmikan berbagai kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan. Akan tetapi, Anak pertama dari Ibn Saud dikenal sebagai raja yang boros suka menghambur-hamburkan uang. Namun, Saud tetap memberikan anak-anaknya jabatan tinggi di masa kepemimpinannya. Hal tersebut membuat sang raja digulingkan oleh keluarganya sendiri. Sang adik, bernama Faisal bin Abdul Aziz, pun naik takhta menggantikan Saud.

Posisi ketiga adalah Raja Faisal bin Abdul Aziz 1964 – 1975. Raja Faisal lahir di Riyadh pada 1906 dan wafat pada 1975. Pemerintahannya dimulai pada 1964 dan berakhir ketika dia wafat. Sebelum menggantikan Saud, Faisal diangkat menjadi Menteri Luar Negeri oleh ayahnya, Abdul Aziz. Pemimpin inovator ini dikenal sebagai raja yang alim dan amat memerhatikan memihak kepada rakyat kecil (kesejahteraan rakyatnya). Faisal menjunjung tinggi program penghapusan perbudakan. Bahkan, dia membeli seluruh budak di Arab dengan uang pribadinya hingga tak ada satu pun budak di negara itu.

Posisi keempat adalah Raja Khalid bin Abdul Aziz 1975 – 1982. Raja yang memerintah pada 1975 hingga 1982 ini naik takhta ketika Raja Faisal wafat. Khalid sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Hijaz pada 1932 dan ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri pada 1934. Raja Khalid banyak membuat kebijakan dalam pemerintahannya baik itu kebijakan dalam ataupun luar negeri. Pada 1982, Khalid berhasil memperbaharui persenjataan kerajaan dengan

mendatangkan 16 pesawat tempur dari Amerika. Khalid wafat pada 1982 karena serangan jantung.

Posisi kelima adalah Raja Fahd bin Abdul Aziz 1982–2005. Raja kelima Arab Saudi ini dilantik menjadi Menteri Pendidikan pada 1953. Kemudian pada 1962, dia menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri. Fahd naik takhta setelah Raja Khalid wafat pada Juni 1982. Fahd berkontribusi besar dalam bidang diplomasi internasional Kerajaan Arab Saudi. Kerja kerasnya mampu membuat perekonomian Arab Saudi berkembang pesat. Pria yang lahir di Riyadh pada 1921 ini wafat pada 1995 karena terserang stroke.

Posisi keenam adalah Raja Abdullah bin Abdul Aziz 2005-2015. Raja Abdullah lahir di Riyadh pada 1924. Abdullah naik menjadi Raja pada 2005 setelah sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri. Pemimpin yang dikenal murah hati tersebut sudah memiliki banyak pengalaman dan memberikan pengaruh besar pada kerajaan ketika masih menjadi Putera Mahkota di masa Raja Fahd. Sejak 1995, Abdullah sudah mewakili peran Raja Fahd yang terserang stroke. Pada masa pemerintahannya Raja Abdullah banyak membuat kebijakan yang menjadikan Arab Saudi disegani di kancah Internasional hingga saat ini. Raja Abdullah wafat pada Jumat 23 Januari 2015.

Sosisi ketujuh adalah Raja Salman bin Abdul Aziz 2015-2017. Raja yang lahir pada 1935 ini sebelumnya berhasil mengubah wajah Riyadh menjadi kota kosmopolitan. Kota Riyadh awalnya hanya memiliki 200 ribu penduduk. Namun, setelah Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman, penduduknya mencapai lebih dari 7 juta penduduk dan menjadi rumah bagi puluhan perguruan tinggi berkualitas tinggi.<sup>23</sup> Posisi terakhir adalah Raja Mohammed bin Salman 2017-sekarang. Mohammed bin Salman bin lahir pada tanggal 31 Agustus 1985. Mohammad bin Salman orang Barat menyingkat (MBS) merupakan putra Raja Salman dari istri ketiganya yaitu Fahda binti Falah bin Sultan bin Hathleenia yang merupakan cucu dari kepala suku Al Ajman yang bernama Rakan bin Hithalayn. Mohammad bin Salman merupakan anak tertua dari tiga bersaudara antara Turki bin Salman dan Khalid bin Salman.<sup>24</sup> Sejak usia muda, Mohammed tertarik pada pemerintahan, membayangi ayahnya dan tetap sadar tentang citranya. Sepanjang jalan dia belajar bagaimana berkomunikasi dengan berbagai pejabat tinggi. Dia kuliah di Universitas King Saud di Riyadh, Arab Saudi, tempat dia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 2007. Dia kemudian mendirikan sejumlah perusahaan dan organisasi nirlaba yang dimaksudkan untuk mempromosikan kewirausahaan di kerajaan. Pada 2009 ia menjadi penasihat formal untuk ayahnya, yang saat itu menjadi gubernur Riyadh. Ketika Salman naik pangkat dan berpengaruh, akhirnya menjadi putra mahkota pada 2012. Karir politik dimulai pada tahun 2012 menjadi Kepala Pengadilan. 2015 menjadi Menteri Pertahanan dan Wakil Paengeran Mahkota. 2017 menjadi Putra Mahkota di pilih langsung oleh ayahnya.<sup>25</sup>

### **Kebijakan Kerajaan Arab Saudi Terkait Visi Arab Saudi 2030**

Ide gagasan terkait Visi Arab Saudi 2030 diusung oleh Mohammed bin Salman. Detainya diserahkan kepada Dewan Urusan Ekonomi dan Perkembangan guna melakukan identifikasi serta memonitor mekanisme implementasi dari Visi Arab Saudi 2030. Pemicunya adalah minyak. Arab Saudi memiliki kekayaan minyak mentah, sehingga menyumbang tiga puluh hingga empat puluh persen Pendapatan Domestik Bruto. Arab Saudi sebelum tahun 2014 menggantungkan pendapatan negara dari Minyak dan Gas. Namun, pada tahun 2014

---

<sup>23</sup> Tim Sindo News, “Sepak Terjang Raja-raja Arab Saudi dari Masa ke Masa,” last modified March 2, 2017, accessed June 28, 2022, <https://nasional.sindonews.com/berita/1184424/19/sepak-terjang-raja-raja-arab-saudi-dari-masa-ke-masa?showpage=all>.

<sup>24</sup> Andi Adriansyah, “Peran Politik Muhammad bin Salman dalam Modernisasi Menuju Visi 2030 Arab Saudi” (UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 38.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 39.

Arab Sudi mengalami kemerosotan dibidang ekonomi disebabkan harga minyak dunia mengalami kemerosotan.<sup>26</sup>

Visi Arab Saudi 2030 memiliki tiga pilar utama. Pertama, menjadikan Arab Saudi sebagai jantung dunia Arab dan Islam. Pilar kedua, determinasi sebagai investasi global dan pilar ketiga mengubah Arab Saudi sebagai perantara bagi tiga benua yakni Asia, Eropa, dan Afrika. Adapun tujuan dari Visi Arab Saudi 2030 ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan tabungan rakyat dari 6 persen menjadi 10 persen total pendapatan rakyat.
2. Mendorong kontribusi sektor non-profit terhadap PDB dari 1 persen menjadi lima persen
3. Menampung satu juta relawan setiap tahunnya (saat ini baru mencapai 11:000)
4. Mendapatkan pendapatan pemerintah dari sektor non-minyak dari 163 miliar riyal menjadi 1 triliun riyal
5. Melalui visi ini pemerintah Arab Saudi ingin meningkatkan peringkat Indeks Efektifitas pemerintah dari urutan delapan puluh ke urutan dua puluh
6. Selain juga meningkatkan Indeks Survey E- pemerintah dari posisi tiga puluh enam menjadi masuk ke lima besar
7. Meningkatkan kontribusi sektor swasta dari empat puluh persen hingga enam puluh lima persen dalam PDB
8. Meningkatkan ekspor non-minyak meningkat dari enam belas persen menjadi lima puluh persen
9. Meningkatkan aset dana Investasi Publik dari 600 miliar riyal menjadi lebih dari 7 triliun riyal
10. Investasi asing turut menjadi perhatian. Pemerintah Arab Saudi menargetkan peningkatan investasi langsung asing dari 3,8 persen menjadi 5,7 persen
11. Pemberdayaan perempuan juga diperhatikan. Dengan reformasi ini, Arab Saudi menginginkan peranan perempuan dalam lingkungan dari dua puluh dua persen menjadi tiga puluh persen
12. Meningkatkan lokalisasi sektor gas dan minyak dari empat puluh persen menjadi tujuh puluh lima persen
13. Meningkatkan kapasitas jamaah Umrah dari delapan juta menjadi tiga puluh juta per tahun
14. Keterbukaan budaya juga menjadi perhatian. Melalui Visi 2030, Pemerintah Arab Saudi menginginkan peningkatan pengeluaran atas aktivitas budaya dan hiburan dari 2,9 persen menjadi 6 persen.<sup>27</sup>

## E. KESIMPULAN

Arab Saudi adalah negara yang berdiri pada 23 September 1932 M. Abdul Azis bin Abdurrahman bin Faisal Al-Saud populer dengan sebutan Ibn Saud adalah raja awal (pertama) negara Arab Saudi modern. Negara ini berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintah menganut monarki Absolut. Raja sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. tetapi negara ini memiliki lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif hampir mirip dengan negara

---

<sup>26</sup> Fajar Nugraha, "Visi 2030 dan Keterbukaan Arab Saudi," *medcom.id*, last modified April 24, 2018, accessed June 28, 2022, <https://m.medcom.id/internasional/opini/ybJ68v6b- visi-2030-dan-keterbukaan-arab-saudi>.

<sup>27</sup> Arab Saudi Government, "Vision 2030 Projects," *Vision 2030*, accessed June 28, 2022, <https://www.vision2030.gov.sa/v2030/v2030-projects/>.

republik, walaupun lembaga-lembaga tersebut masih dikontrol oleh raja. Artinya belum memiliki fungsi independensi sebagaimana yang dicontohkan di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan republik. Pada perkembangannya, Arab Saudi memiliki visi menjadikan Arab Saudi yang kuat, berkembang, dan stabil. Dalam mewujudkannya pemerintah Arab Saudi menetapkan kebijakan jangka panjang yakni Visi Arab Saudi 2030 yang pada intinya menginginkan pendapatan ekonomi Arab Saudi bertambah dan tidak hanya bergantung pada sektor minyak bumi.

Sejarah mencatat Arab Saudi telah berganti pemimpin sebanyak 7x tidak mengherankan jika revolusi pemerintahan terus dilakukan negara ini berbenah demi keberlangsungan baik dalam artian politik, ekonomi, dan stabilisasi dalam berbagai bidang dalam pengembangan visi 2030 tidak lepas dari politik minyak yang semakin tahun semakin menipis sehingga menjadikan Arab Saudi memutar kendali ekonomi yang mulanya ditumpukan pada minyak diharapkan nantinya pada 2030 terjadi pergeseran dan beralih dalam cakupan yang lebih luas. Program tersebut melibatkan berbagai pihak baik Amerika, maupun Eropa sehingga menjadikan Arab Saudi menjadi daya tarik yang lebih tren bagi kalangan Amerika maupun Eropa. Visi 2030 tersebut juga menjadikan daya tarik bagi umat Islam tidak hanya melaksanakan ritual ibadah baik haji dan umroh akan tetapi umat Islam secara global juga menanamkan investasinya sehingga menjadikan penggerak ekonomi yang lebih besar bagi Arab Saudi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab:, Usman Kari Linge Bin. “Demokrasi Dalam Pemikiran Politik : Negara Arab Saudi.” *Usman Kari Linge Bin Abdul Wahab*, November 1, 2013. Accessed June 28, 2022. <http://usmankari.blogspot.com/2013/11/demokrasi-dalam-pemikiran-politik.html>.
- Adriansyah, Andi. “Peran Politik Muhammad bin Salman dalam Modernisasi Menuju Visi 2030 Arab Saudi.” UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Arab Saudi Government. “Vision 2030 Projects.” *Vision 2030*. Accessed June 28, 2022. <https://www.vision2030.gov.sa/v2030/v2030-projects/>.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII: akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Faizi, Lutfan. “Ini Sederet Jabatan yang Disandang Mohammad bin Salman di Arab Saudi.” Last modified February 5, 2022. Accessed June 28, 2022. <https://international.sindonews.com/read/677629/43/ini-sederet-jabatan-yang-disandang-mohammad-bin-salman-di-arab-saudi-1644058921>.
- Firdaus, Angga Diharja. “Politik Pemerintahan Arab Saudi,” May 1, 2010. Accessed June 28, 2022. <http://diharjaangga.blogspot.com//2010/05/politik-pemerintahan-arab-saudi.html%20http://ppi.jordan.tripod.com/infoppi2.htm>.
- Gardner, Frank. “Seberapa parah krisis di Arab Saudi? - BBC News Indonesia.” Last modified May 13, 2020. Accessed June 28, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52644985>.
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 1995.
- Haif, Abu. “Perkembangan Islam di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern).” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 3, no. 01 (October 21, 2015): 12–24.
- Hariyanto. “DAFTAR NEGARA-NEGARA ASIA YANG MENJADI TUJUAN KERJA BMI.” *sbmi*, September 19, 2019. Accessed June 28, 2022. <https://sbmi.or.id/daftar-negara-negara-asia-yang-menjadi-tujuan-kerja-bmi/>.

- Hidriyah, Sita. "Reformasi Ekonomi Arab Saudi." *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional* VIII, no. 09 (2016).
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif, dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- KBRI Riyadh. "Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi." *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Last modified January 1, 2020. Accessed June 28, 2022. <https://kemlu.go.id/riyadh/id>.
- . "Profil Masyarakat dan Budaya Arab Saudi." *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Last modified January 1, 2020. Accessed June 28, 2022. <https://kemlu.go.id/riyadh/id>.
- Kusnanto. *Peradaban Arab*. Semarang: ALPRIN, 2010.
- Muhaimin. "Sebanyak 20 Perempuan Menang Pemilu Bersejarah di Saudi." Last modified December 14, 2015. Accessed June 28, 2022. <https://international.sindonews.com/berita/1069206/43/sebanyak-20-perempuan-menang-pemilu-bersejarah-di-saudi>.
- Nadir, Nadia. "SISTEM PEMERITAHAN DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2020): 161–175.
- Nugraha, Fajar. "Visi 2030 dan Keterbukaan Arab Saudi." *medcom.id*. Last modified April 24, 2018. Accessed June 28, 2022. <https://m.medcom.id/internasional/opini/ybJ68v6b- visi-2030-dan-keterbukaan-arab-saudi>.
- Salma, Abu Khansa. "Sisi Lain Arab Saudi: Politik Pemerintahan Arab Saudi," April 20, 2014. Accessed June 28, 2022. <http://saudi-tauhid-sunnah.blogspot.com/2014/04/kondisi-orang-riya-di-padang-mahsyar.html>.
- Tim Sindo News. "Sepak Terjang Raja-raja Arab Saudi dari Masa ke Masa." Last modified March 2, 2017. Accessed June 28, 2022. <https://nasional.sindonews.com/berita/1184424/19/sepak-terjang-raja-raja-arab-saudi-dari-masa-ke-masa?showpage=all>.
- "Pemilihan Umum Dewan Kota Arab Saudi 2005 | Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab." Accessed June 28, 2022. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/naa/article/view/10613>.
- "Provinsi di Arab Saudi." *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, June 23, 2021. Accessed June 28, 2022. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Provinsi\\_di\\_Arab\\_Saudi&oldid=18549697](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Provinsi_di_Arab_Saudi&oldid=18549697).